

Aroeppala dalam Panggung Politik Pemerintahan di Sulawesi Selatan 1945 –1966

Rahmatul Yushar; Ahmadin; Patahuddin

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM
Rahmatulyushar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, peran, kedudukan Aroeppala, awal karir Aroeppala dalam pemerintahan, kemudian perkembangan karir Aroeppala dalam Politik Pemerintahan di daerah Selayar dan beberapa daerah di Sulawesi Selatan, serta akhir karir politik dari Aroeppala. Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan kajian pustaka dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang mempunyai tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang keluarga Aroeppala mempunyai garis keturunan bangsawan yang secara status sosial tergolong tinggi di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi peluang bagi Aroeppala untuk mampu melanjutkan pendidikannya yang tidak mampu dijangkau oleh orang lain. Aroeppala pun bersekolah di OSVIA yang lulusannya bekerja sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Kebutuhan akan sumber daya manusia pasca proklamasi kemerdekaan sangatlah besar guna menjalankan pemerintahan yang ditinggalkan oleh pemerintahan militer Jepang. Oleh karena itu Aroeppala pun mengisi beberapa tempat –tempat di bagian administrasi pemerintahan mulai dari pegawai administarsi pemerintahan biasa hingga menjadi anggota DPR-GR/MPRS pada tahun 1966-1971. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tidak lamanya masa jabatan Aroeppala di setiap tempat dikarenakan kondisi keamanan belum sepenuhnya pulih pasca kemerdekaan dikarenakan adanya NICA. Aroeppala merupakan sosok dengan kepribadian yang sangat bermasyarakat, adil, disiplin dan jujur sehingga selalu menjadi pilihan untuk ditempatkan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Aroeppala, Pemerintahan, Sulawesi Selatan.

Abstract

This study aims to determine the background, the role, the position Aroeppala, Aroeppala his early career in the government, then the development of Aroeppala career in politics Government in the area of Selayar and several areas in South Sulawesi, as well as the end of the political career of Aroeppala. This research is a historical research with a descriptive analysis approach. This research was conducted through field studies and literature studies using historical research methods that have stages of work, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results of this study indicate that the family background of Aroeppala has a royal lineage that is socially high in society. This is an opportunity for Aroeppala to be able to continue his education that cannot

be reached by others. Aroepala also went to OSVIA where the graduates worked as government administration employees. The need for human resources after the proclamation of independence is very large in order to carry out the government abandoned by the Japanese military government. Therefore Aroepala also filled several places in the administrative section of the government ranging from ordinary government administration employees to become members of the DPR-GR / MPRS in 1966- 1971. Based on the results of the study it can be concluded that the length Aroepala's tenure in each place due to security conditions has not fully recovered after independence due to the existence of NICA. Aroepala is a person with a very sociable, fair, disciplined and honest personality that has always been an option to be placed in various regions in South Sulawesi.

Keywords: Aroepala, Government, South Sulawesi.

A. PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada bulan Ramadhan, Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi, di depan rumah Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur No.56, didampingi oleh Mohammad Hatta serta sejumlah pimpinan bangsa Indonesia, Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.(Hutagalung, 2016). Untuk daerah Sulawesi, berita Proklamasi didapat melalui radio dan diperkuat lagi ketika Dr. Ratulangi menghadiri upacara pembacaan teks proklamasi sebagai utusan dari Sulawesi. Dr. Ratulangi juga menghadiri sidang PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945.(Pawiloy, 1987)

Berita proklamasi kemerdekaan untuk daerah Selayar didapat melalui radio dan surat. Adapun melalui radio, berita itu langsung didengar oleh. Muchtar, Syafaruddin, Mappatoba Karaeng Batara dan K.H. Haiyyung, sedangkan melalui surat, berita itu didapat ketika Aroepala mendapat surat dari Lanto Daeng Pasewang ketika Aroepala bersama Opu Patta Bundu berkunjung ke Makassar.(L, 1990)

Setelah berita proklamasi telah tersebar ke daerah Selayar, maka para pemuda, tokoh nasionalis, serta organisasi yang berbasis perjuangan mulai mengadakan pertemuan guna membahas pola perjuangan dalam upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di daerah Selayar. Tindak lanjut dalam usaha mempertahankan kemerdekaan itu, muncullah beberapa tokoh seperti Rauf Rahman, Mappatoba Karaeng Batara, Daeng Pasolong, Nastoera Aroepala, dr. Muchtar dan K.H. Haiyyung yang bertugas untuk melakukan penerangan kepada rakyat dalam menyikapi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.(Firmansyah, 2015).

Pada tanggal 10 November 1945, pemerintah militer Jepang di Selayar yang dikenal dengan nama Bun Kanrikan menyerahkan kekuasaan kepada Gunco Sudai Bontobangun yang kemudian dijalankan Oleh Aroepala. Pemuda hendak menjalankan pemerintahan dengan membentuk lembaga yang diberi nama Komite Penyelenggara Kemerdekaan (KPK). Rapat pembentukan KPK dilaksanakan secara tertutup dan rahasia pada tanggal 28 Agustus 1945. Mereka pendiri sekaligus anggota KPK terdiri dari 4 orang, yaitu : dr. Muchtar, Husain, Oley, dan Aroepala. Diantara keempat orang itu, hanya dua orang yang asli Selayar, yaitu dr. Muchtar dan Aroepala, sementara dua orang lainnya yaitu Husain berasal dari Mandar, dan Oley dari Manado. Pada penyempurnaan

keanggotaan KPK, Aroeppala menduduki jabatan sebagai Pamongpraja/Ketua Pelaksana Umum/Kepala Pemerintahan Negeri (KPN). (Firmansyah, 2015).

Pada awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dibutuhkan tokoh yang akan mengisi kekosongan pemerintahan dari pendudukan Jepang. Salah satunya yang telah dijelaskan adalah H. Aroeppala atau yang lebih dikenal dengan Aroeppala. Aroeppala merupakan tokoh yang berasal dari Selayar dan tercatat sebagai lulusan OSVIA. Kemudian, terdaftar juga sebagai anggota Islamander dan PSII. Aroeppala turut melibatkan diri dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Kekuatan melawan penjajah dihimpun dengan membentuk Perkumpulan Kedaulatan Rakyat (PKR) Selayar, dan Aroeppala sebagai ketuanya. Belanda sempat membujuk untuk bekerja sama tetapi ditolak. Aroeppala kemudian ditangkap dan dipindahkan ke Makassar bersama beberapa rekan seperjuangannya salah satunya adalah Andi Sultan Daeng Raja. Diawal kemerdekaan Aroeppala terlibat dalam KPK dan saat penyempurnaan organisasi, Aroeppala dipercaya sebagai Pamongpraja/Ketua Pelaksana Umum/Kepala Pemerintahan Negeri (KPN).

Karir politik Aroeppala tidak berputar di daerah Selayar sendiri tetapi beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada tahun 1948 Aroeppala ditarik ke Kantor Gubernur sebagai pegawai pada bagian personalia. Tahun 1949, Aroeppala menjadi Bestuur Assistant di kantor Residen Makassar. Kemudian, ditahun yang sama diangkat menjadi Kepala Pemerintahan Negeri (KPN). Selanjutnya Aroeppala ke Palopo menjadi patih. Jejak karirnya sempat menduduki jabatan penting di Maros, kemudian kembali ke Gowa menjadi Kepala Daerah Swatantra Makassar yang membawahi Gowa, Takalar, dan Jeneponto. (Hannabi, 2007)

Tahun 1960, dilantik sebagai Walikota Makassar, tahun 1966 diangkat menjadi anggota DPR-GR/MPR. Menurut Penanggung Jawab Publikasi dan Informasi Suaka Peninggalan Purbakala Sulseltra, Drs Hasyir Sonda, Aroeppala tidak hanya aktif dalam birokrasi pemerintahan, juga sempat menjadi Rektor Pertama IAIN Alauddin. Tahun 1975 aktif dalam proses pendirian Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Setelah itu, menjadi Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). (Hannabi, 2007)

Uraian terkait jejak politik dan pemerintahan Aroeppala, dapat disimpulkan bahwa Aroeppala mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, disegani oleh masyarakat, serta mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Apalagi pada awal kemerdekaan sangatlah sulit menjadi kepala pemerintahan di suatu daerah apalagi menjadi kepala pemerintahan di berbagai daerah karena harus mampu berkomunikasi dengan yang baik dan menjaga kepercayaan dengan pemerintahan pusat saat itu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bersifat kualitatif. Metode ini sering di gunakan dalam ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya dengan tujuan menemukan suatu hal yang unik dan mampu mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. (Hamid, A. R., & Madjid, 2008). Penelitian ini juga merupakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analitis serta menginterpretasi terkait "*Aroeppala Dalam Politik Pemerintahan di Sulawesi Selatan 1945 -1994* ."

1. Heuristik

Pada penelitian ini pengumpulan data-data yang berkaitan dengan judul dimulai dengan penelusuran dan mengidentifikasi setiap karya-karya ilmiah, dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kehidupan Aroeppala. Untuk penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan dimulai dengan

mengunjungi perpustakaan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar . Dalam penelusuran ini ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan rumusan masalah. Untuk mengecek terkait keterediaan sumber berupa dokumen, maka peneliti pun melanjutkan penelusurannya ke Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 September 2019 hingga arsip yang dibutuhkan sudah cukup. Dalam penelusuran ini ditemukan bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat Selayar secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umumnya pada masa pemerintahan Aroeppala. Selanjutnya untuk menembah referensi maka peneliti pun mengunjungi Perpustakaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 13 Juni 2019 peneliti mengunjungi Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Disinilah peneliti berhasil menemukan kontak untuk dapat mewawancarai anak dari Aroeppala yaitu Ibu Nur Syamsina Aroeppala. Sehingga pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 peneliti berhasil mewawancarai narasumber yaitu Ibu Nur Syamsina Aroeppala bertempat di kediamannya dan saat wawancara mengiyakan untuk memperlihatkan dokumen lama terkait Aroeppala.

2. Kritik Sumber

Setelah pada tahapan sebelumnya mendapatkan atau mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Aroeppala, peneliti pada tahapan ini mencoba memilah beberapa data yang didapatkan secara mendetail meliahat dari bahan maupun substansi data yang didapatkan mulai dari referensi yang didapatkan di perpustakaan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Perpustakaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan perpustakaan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu untuk meguji keabsahan data yang didapatkan peneliti membandingkan dengan dokumen yang didapatkan di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil wawancara dengan Ibu Nur Syamsina Aroeppala sebagai sumber sekunder.

3. Interpretasi

Setelah tahap kritik sumber tahap selanjutnya ialah tahap interpretasi atau penafsiran. Fakta-fakta sejarah yang relavan sebagai hasil dari tahap sebelumnya mengalami proses penafsiran baik fakta-fakta yang beragam maupun yang berdiri sendiri untuk menjadi cerita yang utuh. Dalam tahap ini penulis di tuntut untuk mampu menggunakan kemampuan imajinasi. Interpretasi adalah proses pemaknaan fakta sejarah. Dalam interpretasi, terdapat dua point penting, yaitu sintesis (menyatukan dan analisis (menguraikan). Fakta-fakta sejarah dapat diuraikan dan disatukan sehingga mempunyai makna yang berkaitan satu sama lainnya.(Sejarah, 2013)

4. Historiografi

Dalam hal ini peneliti mencoba untuk merekonstruksi sejarah perjuangan Aroeppala berdasarkan data-data ataupun fakta-fakta yang ditemukan dan telah melalui metode penelitian sejarah itu sendiri. Adapun rekonstruksi sejarahnya didasarkan pada kerangka outline yang telah dibuat oleh peneliti. Sehingga pada tahapan akhir ini menjadi sebuah sejarah yang utuh terkait Aroeppala dalam pemerintahan di Sulawesi Selatan pada tahun 1945 – 1966.

C. TINJAUAN UMUM PENELITIAN

Sejauh ini penelitian akan kesejarahan di Selayar terutama yang berkaitan tentang sejarah di masa kemerdekaan serta sejarah perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sumber buku dan sumber yang agak banyak ditemukan dalam bentuk arsip- arsip. Adapun beberapa penelitian dengan perjuangan rakyat di Selayar sebagai berikut : Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ali Hannapia yang

membahas tentang Makassar di Bawah Pemerintahan Aroepala 1960-1965 yang isinya membahas bagaimana kondisi Makassar di bawah Pemerintahan Aroepala serta kebijakannya di berbagai kehidupan. (Hannapia, 2017), Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat Al Amin yang membahas tentang Perlawanan Rakyat Selayar untuk Mempertahankan Kemerdekaan 1945 -1949 yang isinya membahas tentang situasi dan kondisi keadaan masyarakat ketika runtuhnya kekuasaan Jepang di Selayar, kemudian dibahas pula bentuk perlawanan rakyat Selayar dalam menghadapi Sekutu dan NICA dalam sebuah wadah perjuangan rakyat yang disebut AMRIS dan PPNI. (AL-amin, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Isnain yang membahas tentang Perjuangan Angkatan Muda Rakyat Indonesia Selayar (AMRIS) Mempertahankan Kemerdekaan

Republic Indonesia di Selayar 1946- 1949 yang isinya membahas peranan AMRIS sebagai wadah perjuangan yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. (Isnain, 2003). Buku yang ditulis oleh Firmansyah yang membahas tentang Selayar dan Pergerakan A.G.H Hayyung: Pemberontakan Terhadap Kungkungan Budaya dan Penjajah yang isinya membahas tentang peranan K.H. Haiyyung dalam mempertahankan kemerdekaan di Selayar. (Firmansyah, 2015).

D. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kehidupan Aroepala

Aroepala Karaeng Opu lahir di Batangmata atau tepatnya di Barat Onto (sekarang dalam wilayah administrasi Desa Maharayya), Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 10 juli 1910. Aroepala lahir dari sepasang suami istri yang bernama H. Abdul Aziz dan Sarialang Karaeng Intang. Aroepala anak sulung dari dua bersaudara. Ayah Aroepala dalam hal ini H. Abdul Aziz mempunyai darah Onto dan Batangmata Sapo. Sedangkan, ibu dari Aroepala Sendiri mempunyai darah Mare-Mare. Aroepala mempunyai saudara yang bernama Mappasimba Karaeng Gau.

Aroepala menyelesaikan pendidikan dasarnya di Selayar. Pendidikan *Vervalschool* diselesaikan di Batangmata selama 3 tahun dan dilanjutkan di Benteng selama 2 tahun serta lulus pada tahun 1923.(Aroepala N.S, 2019)

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Aroepala melanjutkan pendidikannya pada *Opleiding School Voor Indische Ambtenar* (OSVIA) di Makassar dan selesai pada tahun 1931. *Opleiding School Voor Indische Ambtenar* (OSVIA) merupakan sekolah pendidikan bagi calon pegawai-pegawai bumi putra pada zaman Hindia Belanda dan setelah lulus para lulusannya akan dipekerjakan dalam pemerintahan kolonial sebagai pamong praja. Aroepala seangkatan dengan beberapa tokoh perjuangan yang terkenal di Sulawesi Selatan seperti Karaeng Binamu dan Mattewakkang Daeng Raja.(Hannabi, 2007)

Aroepala dalam perjalanan rumah tangganya mempunyai dua orang istri. Istri pertama bernama Karaeng Buena yang berasal dari Laiyolo. Pada istri pertama ini, Aroepala tidak mempunyai keturunan. Istri pertama ini atau Karaeng Buena meninggal pada tahun 1945,dan pada tahun 1945, Aroepala kembali menikah dengan seorang putri bernama Patimasang. Istri kedua Aroepala adalah anak dari Opu Bonto Bangun yang bernama H. Muhammad Oppu Patta Bundu. Pernikahan kedua Aroepala mempunyai dua orang anak yang bernama Nur Qamar Aroepala dan Nur Syamsina Aroepala. Istri pertama dan kedua Aroepala, masih mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat, karena merupakan kerabat dekat dari ayah istri keduanya dalam hal ini H. Muhammad Oppu Patta Bundu. Pada saat pernikahan mereka dianggap turun ranjang dikarenakan dekatnya hubungan kekerabatan antara Karaeng Buena dengan H. Muhammad Oppu Patta Bundu. Aroepala, pada pernikahan keduanya

mempunyai jarak yang sangat jauh yaitu 15 tahun lebih tua dengan istrinya dan pada tahun 1946 lahirlah anak pertama dari pasangan ini.(Aroeppala N.S, 2019)

2. Karir Politik Aroeppala Dalam Pemerintahan

a. Awal Karir Politik

1) Anggota Islamander dan PSII

Selayar sendiri, PSII didirikan pada hari Minggu 18 Juni 1933 di daerah Padang melalui ceramah yang dibawakan oleh *Openbave Vergadering*. Sebagai organisasi yang mengutamakan syariat Islam sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Selayar yang mayoritas menganut Agama Islam. Tidak terkecuali Aroeppala tergabung dalam organisasi ini. Namun peran Aroeppala tidak terlihat di organisasi ini. Aroeppala mulai berperan ketika PSII ini melebur ke dalam Nadhlatul Ulama (NU). Pasca menyelesaikan studi di OSVIA Aroeppala langsung diberi tanggung jawab. Adapun beberapa jabatan yang sempat di duduki oleh Aroeppala hingga pada masa proklamasi kemerdekaan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Surat Keputusan dari *Guverneur Van Celebes On Onderkerigheden* dengan No.4 pada Tanggal 3 Juli 1931, Aroeppala diserahi amanah dengan diangkat sebagai *Gediplomaerde Ambtenaren Voor De Inlandsche Bestuurdienst (GAIB)* di daerah Sinjai dengan gaji pokok sebesar 100 Gulden. Aroeppala bekerja hampir 2 tahun lamanya di Sinjai.
- b) Berdasarkan Surat Keputusan dari *Guverneur Van Celebes On Onderkerigheden* dengan No.153 pada Tanggal 23 Februari 1934, Aroeppala dipindahkan dari Sinjai ke Selayar dengan perubahan gaji pokok yang didasarkan pada Surat Keputusan dari *Guverneur Van Celebes On Onderkerigheden* dengan No. 356 pada tanggal 18 April 1934 sebesar 99,60 Gulden.
- c) Berdasarkan Surat Keputusan dari *Guverneur Van Celebes On Onderkerigheden* dengan No.746 pada Tanggal 7 Oktober 1936, Aroeppala dipindahkan dari Selayar ke daerah Muna (Raha) dengan perubahan gaji pokok yang didasarkan pada Surat Keputusan dari *Guverneur Van Celebes On Onderkerigheden* dengan No. 1093 pada tanggal 30 Desember 1936 sebesar 110 Gulden. Menjelang masa akhir tugasnya di Muna, Aroeppala tersandung kasus dugaan pengembalian pajak pada rentang tahun 1934 -1935. Tetapi pada akhirnya, Aroeppala membantah dugaan tersebut pada saat dimintai keterangan oleh Louis Anthonie Kortman di Muna pada Tanggal 17 Februari 1934 dengan berdalih bahwa pengembalian pajak tersebut diatasnamakan dirinya.(Arsip Selayar Volume 1 No. Reg. 196 tentang, n.d.)
- d) Berdasarkan Surat Keputusan dari *Residen Sulawesi* dengan No. 299 pada tanggal 25 Mei 1938, Aroeppala dipindahkan dari Muna ke Jeneponto dengan perubahan gaji pokok yang didasarkan pada surat keputusan dari *Residen Sulawesi* dengan No.435 pada tanggal 28 Agustus 1938 sebesar 120 Gulden.(Arsip Pemerintahan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988 Volume I No. Reg. 446 yang membahas tentang, n.d.)
- e) Berdasarkan Surat Keputusan dari *Residen Sulawesi* dengan No.430 pada Tanggal 28 Juni 1941, Aroeppala diberikan tanggung jawab sebagai *Help Bestuur Assistant* di Jeneponto dengan perubahan gaji pokok sebesar 170 Gulden
- f) Dari riwayat hidup Aroeppala yang dituliskan oleh Usman berdasarkan hasil wawancaranya dengan Aroeppala dalam lampiran skripsinya yang berjudul "*Perubahan-Perubahan Administrasi Pemerintahan di Selayar 1906 -1975*" dijelaskan jika Aroeppala pada tahun 1942 dipindahkan ke *Onderafdeling Gowa* dan berkedudukan di Pakkatto guna mengurus pengungsi masyarakat Tionghoa Makassar dan juga keluarga-keluarga tentara KNIL Belanda.

g) Kemudian pada tahun 1942, Aroepala dipindahkan ke Selayar untuk membantu mertuanya Muh. Opu Patta Bundu hingga masa kemerdekaan dan masuknya *Netherlands-Indies Civil Administration* (NICA) pada tahun 1946.

2) Anggota Komisi Penyelenggara Kemerdekaan (KPK)

Aroepala sebagai putera asli Selayar turut andil dalam pembentukan lembaga ini. Rapat pembentukan KPK dilaksanakan secara tertutup dan rahasia pada tanggal 28 Agustus 1945. Mereka yang menjadi pendiri sekaligus anggota KPK terdiri dari empat orang, yaitu: dr. Muchtar, Husain, Oley, dan Aroepala. Karena satu urusan yang tidak bisa ditinggalkan, Aroepala tidak turut hadir pada rapat pembentukan KPK yang digagasnya bersama teman-teman Muhammadiyah lainnya. Di antara keempat orang itu, hanya dua orang asli Selayar, yaitu dr. Muchtar dan Aroepala, sementara dua orang lainnya yaitu Husain berasal dari Mandar dan Oley berasal dari Manado. Untuk sementara, jabatan ketua dipercayakan kepada dr. Muchtar.(Firmansyah, 2015).

Aroepala menjalankan pemerintahan di Selayar tidak begitu lama dikarenakan kedatangan tentara sekutu dan NICA. Pada tanggal 16 Maret 1946 Aroepala ditawan oleh pemerintahan NICA karena dianggap mempengaruhi keamanan dan situasi pemerintahan NICA sehingga Aroepala diasingkan ke Muna dengan beberapa pejuang lainnya. Aroepala ditahan oleh NICA sampai Mei 1948.

3) Perkumpulan Kedaulatan/Keselamatan Rakyat (PKR) Selayar

Situasi yang cenderung akan mengganggu ketentraman penduduk, Aroepala mengajak mertuanya yakni Muhammad Opu Patta Bundu berangkat ke Bulukumba untuk meminta petunjuk pada Andi Sultan Daeng Raja pada tanggal 6 Oktober 1945 dan kembali pada tanggal 9 Oktober 1945. Akhirnya pada tanggal 10 Oktober 1945 di Selayar terbentuknya organisasi yang berafiliasi dengan PKR yang dibentuk oleh G.S.S.J Ratulangi. Merasa kehadiran Aroepala adalah sebagai ancaman terhadap NICA, maka akhirnya pada tanggal 16 Maret 1946 Aroepala ditahan oleh pemerintah NICA.(Arsip Regering Van Oost Indonesia (Pemerintah Negara Indonesia Timur Tahun 1946-1950) No. Reg. 154 yang membahas Tentang Dokumen Tahanan Aroepala tentang berkas mengenai beberapa tahanan politik, n.d.).

4) Perkembangan Karir Politik

a) Menjadi *Bestuur Assistant* pada Kantor Residen di Makassar

Berdasarkan surat dari *Resident Zuid Celebes* Komisariat Negara Tengah dengan No. 239 tertanggal 17 Mei 1949, Aroepala diberikan amanah menjabat sebagai *Bestuur Assistant* pada kantor residen di Makassar dengan besaran gaji yang didasarkan pada surat dari *Resident Zuid Celebes* Komisariat Negara Tengah dengan No. 665 dan 666 sebesar 450 Gulden.

b) Menduduki Jabatan penting di Maros

Pada tahun 1952, tepatnya pada tanggal 4 September Gubernur Sulawesi mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor 493 untuk menetapkan Aroepala sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Negeri Maros. Sebelumnya Kepala Pemerintahan Negeri Maros dijabat oleh Andi Pappé Dg. Massikki. Akhirnya pada tanggal 8 November 1951 Andi Pappé Dg. Massikki melakukan serah terima jabatan pemerintahan *Onderafdeling* Maros ke Aroepala. Hal ini pun tertuang pada berita acara serah terima jabatan dengan NO. 4605/1.(Arsip Maros 1943-1975 Volume I Kepala Pemerintahan Maros; Proses Verbal tahun 1950-1967).

Pada tanggal 27 Agustus 1952, Aroepala secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Maros. Dalam berita acara serah terima jabatan dengan Nomor 4159/1 Aroepala digantikan oleh Mardjan Dg. Malewa. Mardjan Dg. Malewa sebelumnya merupakan Wakil Kepala Pemerintahan Negeri Maros.

c) Menjadi Pati (Pembantu Bupati) di Palopo

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dengan Nomor Surat 131/BP yang tertanggal 17 Juli 1952, Aroepala pun diangkat sebagai pegawai yang diperbantukan pada Kepala Daerah Luwu di Palopo. Selanjutnya tidak genap sebulan kembali keluar Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri dengan Nomor Surat UP.7/11/25, Aroepala pun diangkat menjadi patih di daerah Luwu dengan gaji sebesar 750 Rupiah yang sebelumnya dalam surat keputusan yang sama dengan Nomor UP.19/198/15 sebesar 650 Gulden. (Arsip Luwu 1918-1970 No. Reg. 57 tentang surat perintah Kepala Pemerintahan Militer Kabupaten Luwu 1918)

d) Menjadi Bupati Kepala Daerah Swatanta Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor UP.7/9/38 yang tertanggal 18 Juni 1954, Aroepala diserahi tugas sebagai Bupati Kepala Daerah Makassar. Adapun kenaikan gaji yang didapatkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan nomor UP.19/17/31 yang tertanggal 25 Januari 1955 sebesar 1.074 Rupiah yang sebelumnya 1.008 Rupiah. Setelah itu, Aroepala pun melakukan penyesuaian pangkat kedalam PSPN 1955 sebagai Bupati Kepala Daerah Makassar pada tanggal 21 Mei 1955 dengan Nomor Surat Keputusan UP.30/2/36 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan perubahan gaji 1.294. Seperti dalam masa jabatan sebelumnya, Aroepala kembali dipindahkan ke Kantor Gubernur Sulawesi pada tanggal 13 Maret 1957 dengan Nomor Surat Keputusan UP.7/4/11 dari Menteri Dalam Negeri.

e) Menjadi Walikota Makassar

Aroepala adalah walikota kelima yang memimpin Kota Praja Makassar. Aroepala kemudian dipercaya untuk mengembeng amanah sebagai walikota Makassar setelah walikota sebelumnya yaitu Sampara Dg. Lili, Ahmad Darah Syahrajudin, M Yunus, Daeng Mile, dan Abdul Latief Dg. Masikki. Aroepala menjadi walikota Makassar mulai tahun 1960-1965. Berbagai kebijakan dibuatnya, baik itu di bidang pendidikan, bidang pembangunan, penataan administrasi, dan pemungutan retribusi ataupun pajak. (Ma'mur, N. A., & Kusuma, 2007)

Setelah masa jabatan Ahmad Darah Sirajuddin berakhir pada tahun 1957. Dalam Surat Gubernur Sulawesi dengan Nomor Pemx I/4/21. dengan tanggal 29 Oktober 1959, Aroepala dicalonkan sebagai walikota Makassar bersama kedua rekan yang lainnya yaitu: M. Amin Dg. Siruwa dan H. Makkaraeng Dg. Mandjarungi yang ditetapkan dalam sidang D.P.R.D. Kotapradja Makassar pada tanggal 22 Oktober 1959 setelah mendapatkan tindakan "retooling" sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 28 Januari 1960, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor UP. 15/1/5395, Aroepala diangkat sebagai kepala daerah Kotapradja Makassar dengan gelar walikota dengan gaji sebesar 2.324 Rupiah. Pada telegram yang diterima Kota Makassar untuk sesegera mungkin dilakukan serah terima jabatan dari walikota sebelumnya. Akhirnya pada tanggal 6 Februari 1960 Aroepala dilantik menjadi walikota Makassar dan bersamaan dilantik dengan kepala daerah seluruh Sulawesi Selatan dan Tenggara. (Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 Volume I No. Reg 2013.)

f) Menjadi Anggota DPR-GR/MPR 1966 – 1971

Sebagai putera daerah Selayar, tentunya ia tidak lepas perhatian pada Selayar itu sendiri. Pada tanggal 28 Agustus 1969, Aroepala menyampaikan ceramahnya sebagai salah satu anggota DPR-GR/MPR periode 1966-1971. Adapun tempat pelaksanaannya di Gedung Dharma Wanita, Benteng, Selayar. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentunya Aroepala menyerap ataupun mendengar apa

yang menjadi kebutuhan, sara, serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat Selayar secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umum. (Arsip Selayar Volume 1 No. Reg. 1745)

3. Kiprah Aroepala diluar Pemerintahan

Berikut beberapa perannya di tengah-tengah masyarakat baik ketika ia masih berstatus sebagai pegawai pemerintahan maupun tidak di instansi pemerintahan antara lain :

- a. Menjadi rektor pertama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) yang dulunya bernama Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar pada tahun 1965-1968.
- b. Setelah menjadi rektor pertama di IAIN Makassar, Aroepala juga tergabung aktif dalam proses pendirian Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 1975.
- c. Setelah itu, menjadi Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). (Hannapia, 2017). PWRI merupakan organisasi di Indonesia tempat berhimpunnya para pensiunan pegawai negeri sipil. Organisasi nirlaba ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 1962 dengan asas pancasila serta bersifat nasional, mandiri, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- d. Ketika di Selayar, Aroepala bersama dengan tokoh masyarakat dan agama sempat tergabung dalam pembangunan pesantren Kolo-kolo di Selayar.
- e. Aroepala aktif ataupun tergabung dalam ikatan masyarakat yang aktif dalam pembangunan Masjid Agung AL-Umaraini Benteng di Selayar. Aroepala pun meninggal sebelum peresmian masjid ini. Masjid ini diresmikan pada 8 April 1999 oleh Gubernur KDH. Tk. I Sulawesi Selatan oleh H.Z.B. Palaguna.

4. Aroepala di Masa Tuanya

Aroepala menikmati masa tuanya di Benteng sekitar 25 Km dari kampung kelahirannya. Berdekatan dengan kantor pemerintahan waktu ia menjadi kepala pemerintahan di Selayar dan sekarang menjadi rumah jabatan bupati. Rumahnya pun tidak menunjukkan bahwa ia merupakan bekas birokrat yang terkenal. Bahkan rumahnya pun sama dengan kebanyakan warga di sekitarnya yaitu rumah kayu. Sangat jauh dari kesan kemewahan. Bahkan di masa pensiunnya, Aroepala sering dikunjungi oleh bupati Kepulauan Selayar yang sementara dalam masa jabatan untuk dimintai pendapatnya terkait masalah pemerintahan. Karena faktor usia, Aroepala pun sering mengalami sakit-sakitan. Akhirnya pada 27 Februari tahun 1994 di usia yang sangat tua yaitu 84 tahun, setelah dirawat di Rumah Sakit Akedemis/Jauri, Aroepala pun menghembuskan napas terakhirnya. Aroepala dimakamkan tempat pemakaman umum di Panaikang Makassar. Berbagai kalangan menginginkan Aroepala dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Akan tetapi karena sebuah wasiat yang ditinggalkannya untuk dimakamkan bersama masyarakat pada umumnya.

5. Bentuk Apresiasi Pemerintah Terhadap Jasa Aroepala

Sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dan berjasa dalam hal pemerintahan di Selayar secara khusus maupun di beberapa daerah di Sulawesi Selatan pada umumnya, maka Aroepala pun diberikan penghargaan antara lain :

- a. Veteran dengan tanggal pendaftaran 30 Januari 1960 dengan No. 1787/P/2/I/60.
- b. Serta pada tanggal 30 Oktober 1981 mendapatkan Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia Golongan A dari Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI.
- c. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara di Selayar dengan nama Bandara Aroepala. Bandara ini terletak di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontosikuyu. Bandara ini digagas oleh bupati Drs.H.M.Akib Patta dan

diresmikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia yaitu Bapak Agum Gumelar pada tahun 2000, tepat pada hari pembangunan nasional tanggal 17 September

- d. Namanya diabadikan sebagai nama ruas jalan di ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu di Kota Benteng dengan nama Jalan Aroeppala.
- e. Namanya diabadikan sebagai nama ruas jalan di Makassar setelah Letjend Hertasning dengan nama Jalan Aroeppala.
- f. Patungnya dipajang bersama dengan patung-patung pejuang Sulawesi Selatan di Anjungan Pantai Losari.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aroeppala Karaeng Opu lahir di Batangmata atau tepatnya di Barat Onto (sekarang dalam wilayah administrasi Desa Maharayya), Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 10 juli 1910. Aroeppala lahir dari sepasang suami istri yang bernama H. Abdul Aziz dan Sarialang Karaeng Intang.
2. Sebagai lulusan OSVIA sekolah yang dibekali dengan keterampilan dalam soal administrasi pemerintahan, maka sudah hal pasti jika Aroeppala menjadi Pamong praja/pegawai pemerintahan. Selain itu Aroeppala tergabung dalam Anggota Islamander dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), selanjutnya pada tahun 1931 menjadi *Gediplomaerde Ambtenaren Voor De Inlandsche Bestuurdienst (GAIB)* di daerah Sinjai, pada tahun 1934, pada tanggal 23 Februari 1934, Aroeppala dipindahkan dari Sinjai ke Selayar, pada tanggal 7 Oktober 1936, Aroeppala dipindahkan dari Selayar ke daerah Muna (Raha), pada tanggal 25 Mei 1938, Aroeppala dipindahkan dari Muna ke Jeneponto, pada tanggal 28 Juni 1941, Aroeppala diberikan tanggung jawab sebagai *Help Besteuur Assistant* di Jeneponto, pada tahun 1942 dipindahkan ke *Onderafdeling* Gowa dan berkedudukan di Pakkatto, pada tahun 1942, Aroeppala dipindahkan ke Selayar untuk membantu mertuanya Muh. Opu Patta Bundu hingga masa kemerdekaan dan masuknya *Netherlands-Indies Civil Administration (NICA)* pada tahun 1946.
3. Hal yang patut diteladani dari kehidupan Aroeppala adalah kesederhanaan dan tidak meninjolkan status social dan tidak membedakan orang yang berada di sekelilingnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroeppala N.S. (2019). *Latar Belakang Kehidupan Aroeppala N.S.*
Arsip Luwu 1918-1970 No. Reg. 57 tentang surat perintah Kepala Pemerintahan Militer Kabupaten Luwu tentang. (1918). *Penunjukan Aroeppala untuk mewakilinya selama berpergian.*
- Arsip Maros 1943-1975 Volume I Kepala Pemerintahan Maros; Proses Verbal tahun 1950-1967 tentang. (n.d.). *serah terima jabatan Pemerintah Negeri Maros.*
- Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 Volume I No. Reg 2013 tentang. (n.d.). *berkas mengenai pencalonan dan pemilihan Walikota Makassar.*
- Arsip Pemerintahan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988 Volume I No. Reg. 446 yang membahas tentang. (n.d.). *Riwayat Hidup Walikota Makassar, surat tanggal 7 Mei 1965 tentang permohonan berhenti Aroeppala Walikota Makassar.*

- Arsip Regering Van Oost Indonesie (Pemerintah Negara Indonesia Timur Tahun 1946-1950) No. Reg. 154 yang membahas Tentang Dokumen Tahanan Aroeppala tentang berkas mengenai beberapa tahanan politik, Y. (n.d.). *Mattewakkang Daeng Radja, Adi Djemma, Andi Pangerang Opoe Tosinilele, Aroeppala, Andi Maradang, C.Z.M. Waworoentoe, Andi Atjo Aroeng Matowa Polewali, P.S. Pohan, M.M Amin d Andi Mappasere. Dalam bahasa Belanda dan Indonesia 1945- September 1949.*
- Arsip Selayar Volume 1 No. Reg. 1745 tentang. (n.d.). *liputan ceramah H. Aroeppala/Anggota MPRS pada tanggal 28 Agustus 1969.*
- Arsip Selayar Volume 1 No. Reg. 196 tentang. (n.d.). *surat de Controleur van Muna (Raha) 18 Februari 1938 kepada Controleur van Selayar tentang permintaan penjelasan menyangkut Aroeppala di Kassi.*
- Firmansyah. (2015). *Selayar dan Pergerakan A.G.H Hayyung: Pemberontakan Terhadap Budaya Dan Penjajah.* Pustaka Sawerigading.
- Hamid, A. R., & Madjid, M. S. (2008). *Pengantar Ilmu Sejarah.* Rayhan Intermedia.
- Hannabi, R. (2007). *Profil Raja & Pejuang Sulawesi Selatan I.* Refleksi.
- Hannapia, M. . A. (2017). *Makassar di Bawah Pemerintahan Aroeppala 1960-1965.*
- Hutagalung, B. . (2016). *Serangan Umum 1 Maret 1945: Perjuangan TNI, Diplomasi dan Rakyat.* Matapadi Presindo.
- L, R. O. (1990). *Perang Kemerdekaan Republik Indonesia di Selayar 1945-1949.* Ujung Pandang :UNHAS.
- Ma'mur, N. A., & Kusuma, B. A. (2007). *Walikota Makassar Legenda Di Timur: Persembahan 400 tahun Kota Makassar.* Makassar : Yapensi.
- Pawiloy, S. (1987). *Arus Revolusi 1945 di Sulawesi selatan, Ujung Pandang : DHD Angkatan 45 Sulawesi Selatan.*
- Sejarah, T. P. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah.* Makassar : Universitas Negeri Makassar.